

ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (SEBUAH STUDI INTREPETATIF PADA PEGGY SALON)

¹Lilya Andriani,
¹Anantawikrama Tungga Atmadja, ²Ni Kadek Sinarwati

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {lilya_andriani@yahoo.com, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com,
kadeksinar20@gmail.com}

Abstrak

SAK ETAP merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM. Namun, dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM masih jauh dari SAK ETAP. Kondisi ini terjadi pula di Peggy Salon, sebuah UMKM yang bergerak di bisnis kecantikan yang terletak di Kabupaten Buleleng. Meskipun Peggy Salon telah lama didirikan, memiliki organisasi serta aktivitas bisnis yang memadai namun belum dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik. Latar belakang inilah yang menjadikan Peggy Salon menarik untuk dikaji untuk mengetahui; 1) praktik pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dititikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP. Penelitian dilakukan dalam empat tahapan, yakni; 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, serta 4) analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari *stakeholder* yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Kata kunci: Faktor, SAK ETAP, Sistem pencatatan keuangan, UMKM

Abstract

SAK ETAP is one of the financial standards which are established to ease the UMKM in proposing and delivering the financial statement to be more informative in order to ease the investor and creditor to give credit to the entrepreneur of UMKM. However, if it was seen from the implementation, the financial record which had been conducted by UMKM was still far from SAK ETAP. This situation also happened in Peggy Salon, a UMKM which is involved in beauty sector located in Buleleng

Regency. Although Peggy Salon has been long established, owned proper organization and business activities, it was still not able to implement SAK ETAP properly. Due to this background, Peggy Salon became interesting to be analyzed to find out: 1) the practice of financial record conducted by the UMKM, 2) The factors which cause the SAK ETAP-based-financial-record not to be conducted in UMKM.

This research was conducted by using qualitative method which emphasized on the description and interpretation of the habit of human in the implementation of SAK ETAP-based-financial-record. This research was carried out in four steps, such as: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data display, and 4) verification.

The result of this research shows that: 1) the system of financial record which is conducted manually and simply is aimed to ease the owner in giving bonus to the staffs, 2) The factors which cause the failure of SAK ETAP in Peggy Salon are the internal factors like the inadequacy of understanding, discipline, and human resources, and the external factors, such as lack of control from the stakeholder who is in charge of the financial record.

Keywords: Factor, SAK ETAP, Financial Record System, UMKM

PENDAHULUAN

Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Namun, selama ini UMKM masih memiliki banyak keterbatasan dan kendala terutama kendala yang terdapat antara UMKM dan perbankan selaku penyalur kredit bagi UMKM. Kelayakan usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan permasalahan UMKM yang dirasakan selama ini oleh pihak Bank (Bank Indonesia, 2005). Belum adanya kesamaan *mindset* antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan *bussines plan* (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM. Padahal dengan adanya laporan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Usaha Kecil.

Beberapa hasil penelitian (Pinasti, Hariyanto, Idrus, Marbun) dalam Pinasti (2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha

kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Musmini (2008) menunjukkan bahwa kebanyakan usaha kecil di Kecamatan Buleleng tidak menyelenggarakan catatan akuntansi, beberapa yang mempunyai catatan keuangan modelnya sangat sederhana dan tidak sistematis. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan pentingnya akuntansi belum dipahami oleh pengusaha UMKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi akuntansi, para pemilik usaha dapat mengetahui bagaimana posisi serta kinerja keuangannya, tidak hanya itu pemilik usaha akan lebih mudah untuk menghitung pajak, karena laporan keuangan merupakan sumber data untuk menghitung pajak.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas

yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK ETAP ini ke depannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

UMKM dan Koperasi di daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali jumlah UMKM Tahun 2011 mencapai 233.334 unit yang tersebar diseluruh Kabupaten di Bali, salah satunya di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang begitu besar potensi jumlah penduduk dan memiliki beberapa dunia usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Perkembangan UMKM yang ada di kabupaten Buleleng tahun 2012 ditunjukkan pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Buleleng tahun 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah	
		Formal	Non Formal
1.	Perdagangan	2.838	3.583
2.	Pertanian	564	1.161
3.	Non Pertanian	705	637
4.	Aneka Jasa	499	266
Total		4.607	5.646

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2013

Dari tabel 1. di atas dapat diketahui total keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 10.253 UKM dari berbagai jenis usaha dan produksi yang dihasilkan. Salah satu dari usaha itu yakni usaha salon dan spa. Bisnis salon dan spa dewasa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Animo masyarakat untuk mengunjungi salon kecantikan semakin tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah salon dan spa di Kota Singaraja yang mengalami peningkatan secara signifikan (Herawati dkk, 2010; 2). Bisnis ini dapat dikelola dalam skala kecil atau bisnis rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan untuk menjalankannya dengan manajemen bisnis yang modern. Untuk menghadapi tuntutan pengembangan manajemen bisnis yang lebih modern dan permasalahan dibidang permodalan, para pelaku UMKM di bidang salon dan spa pernah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan LPM UNDIKSHA perihal pelatihan penyusunan laporan laba rugi (*income*

statement) yang dilaksanakan pada tahun 2010. Namun, UMKM salon dan spa yang ada di Kota Singaraja masih merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Usaha salon dan spa yang terdaftar pada Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi (DISPERINDAGKOP) tahun 2012 berjumlah 22 unit usaha, namun sebenarnya masih banyak terdapat usaha salon dan spa yang ada di Kabupaten Buleleng namun usaha tersebut belum mendaftarkan usahanya di DISPERINDAKOP. UMKM yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Peggy Salon.

Peggy Salon merupakan usaha bisnis kecantikan yang telah berdiri cukup lama yakni semenjak tahun 1999 hingga sekarang. Peggy Salon berlokasi di jalan Dewi Sartika Utara No. 39 B di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti, Peggy Salon merupakan salah satu UMKM yang sudah melakukan pencatatan keuangan dibandingkan dengan usaha salon lainnya yang ada di

Kabupaten Buleleng, dan Peggy Salon pernah mengikuti pelatihan dan seminar pencatatan keuangan, sehingga pemilik Peggy Salon sudah menyadari arti pentingnya melakukan pencatatan keuangan bagi suatu usaha, namun dalam implementasinya pencatatan yang dilakukan masih belum sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Pencatatan yang dilakukan selama ini hanya sebatas pencatatan jumlah pemasukan, pengeluaran dan untuk pengingatan dalam menentukan jumlah bonus yang diberikan untuk karyawannya.

Kenyataan ini amat menarik dikaji karena walaupun dengan adanya SAK ETAP untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan untuk usahanya, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM masih jauh dari standar yang telah ditetapkan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, yakni “bagaimana praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Peggy Salon?” dan “mengapa Peggy Salon tidak menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP?”. Sehingga tujuan yang dicapai dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan selama ini oleh Peggy Salon serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada usaha Peggy Salon.

Dalam rangka menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian ini digunakan paradigma interpretive untuk mencari makna (*meaningful*) dari tindakan sosial masyarakat (Weber dalam Neuman, 2000) yang memiliki kaitan erat dengan metode tafsir sebagai alat interpretasi tekstual maupun kontekstual. Jadi peneliti mengintrepetasikan adanya faktor internal dari diri UMKM itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari *stakeholder* yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat, yakni: *pertama*, manfaat teoritis terkait dengan penamabahan wawasan baru bagi dunia akuntansi, serta

memperkaya hasil penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mengingat penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP masih belum terealisasi secara optimal. *Kedua*, manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM guna meningkatkan kegiatan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP dalam memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para *stakeholder* untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi implementasi pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Paradigma interpretif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey pendahuluan untuk menggali informasi *up to date* dan untuk memperoleh gambaran tentang UMKM, wawancara mendalam (informan ditunjuk secara *purposive sampling* dan dengan *snowball chain sampling*), observasi terhadap praktik pencatatan keuangan, serta studi dokumen, misalnya nota, catatan keuangan, struktur organisasi, *job-description*, dan dokumen lain yang terkait. Aneka teknik ini dipakai secara terpisah dan secara triangulatif agar kesahihan data terjamin. Data diolah memakai teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut (Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2004)): Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta menarik kesimpulan (verifikasi). Tahapan teknik analisis data tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir, yang bersifat holistik dan sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji (Atmadja, 2006:22).

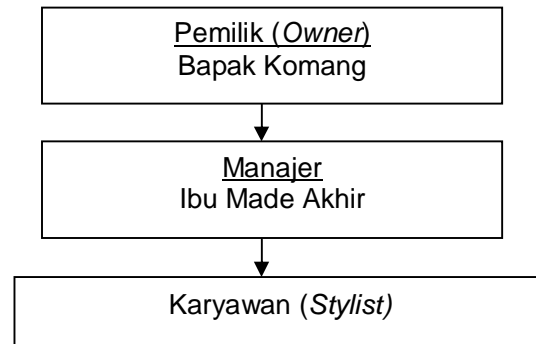
HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peggy Salon

Peggy Salon adalah perusahaan milik perseorangan yang didirikan pada tahun 1999 oleh Ibu Made Akhir bersama suaminya Bapak Komang. Berdirinya Peggy Salon ini dipelopori dari hobi Ibu Made Akhir yang sangat suka dengan dunia kecantikan, dengan dibukanya Peggy Salon ini tidak hanya dapat menyalurkan hobi Ibu Made Akhir tetapi juga dapat membantu keuangan keluarga serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, saat ini Ibu Made Akhir mempekerjakan 6 orang wanita sebagai *stylist*. Keunikan yang dimiliki Peggy Salon dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya terletak pada strategi usaha yakni mengutamakan teknik potong, melayani *makeup* rias pengantin, dan Peggy Salon juga memiliki studio foto yang berlokasi di jalan Baktiseraga dengan nama usaha Peggy Salon & Photo. Dalam menjalankan usahanya Ibu Made Akhir selalu menyesuaikan dengan situasi kondisi singaraja, target pasar dalam menjalankan usahanya yakni anak-anak remaja sehingga harga yang ditetapkan relative menengah kebawah.

Strategi promosi yang dilakukan Peggy Salon yaitu dengan cara *mouth to mouth*, memasang iklan melalui media elektronik yakni radio, media *social networking* yakni melalui *facebook* dan sering ikut serta dalam mensponsori kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selain itu Peggy Salon juga memberikan Voucher 10% bagi pelanggan yang telah memiliki kartu pelanggan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik selalu memperhatikan kepuasan dan kenyamanan konsumennya. Salah satu perhatian ini ditunjukkan dari konsep penataan usaha *indoor* maupun *outdoor* yang dilakukan oleh Peggy Salon.

Struktur organisasi yang ada pada Peggy Salon tidak tertulis dan masih sangat sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pemilik salon dapat digambarkan struktur organisasi Peggy Salon sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Peggy Salon (Sumber: Hasil Wawancara, 2013)

Sistem Pencatatan Keuangan Peggy Salon

Peggy Salon adalah sejenis jasa perawatan kecantikan yang berskala kecil, yang berdiri sejak 1999 di Jalan Dewi Sartika Utara No. 39 B, Singaraja, dibantu oleh enam orang karyawan. Ruang lingkup aktivitas usaha mencakup pemberian jasa perawatan kecantikan mulai dari perawatan rambut, perawatan kulit dan tata rias wajah (*makeup*) serta penjualan obat-obat kecantikan. Tata cara pengelolaan masih dilakukan oleh pemilik sendiri yaitu dalam hal pembelian stock barang, personalia dan laporan keuangan. Pemilik usaha mengetahui bahwa pencatatan keuangan suatu usaha penting untuk dilakukan dengan melakukan pencatatan keuangan dapat diketahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran sehingga nantinya dapat menghitung laba yang diperoleh dan dapat mengetahui bagaimana kinerja usahanya, seperti yang tercermin dalam kutipan wawancara dengan ibu Made Akhir pemilik Peggy Salon berikut.

“Pencatatan keuangan perlu, penting sekali, kalau kita biar tahu antara pendapatan dan pengeluaran itu ya.. tapi kadang-kadang biar tidak seperti pepatah lebih besar pasak dari pada tiang *gitu ya...* makanya perlu dicatat”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Komang selaku suami dari Ibu Made

“....untuk mengetahui peningkatan usaha kita, untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan seberapa, *balance nggak*”

Namun dalam implementasinya sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh pemilik Peggy Salon masih sangat sederhana dan proses pencatatan yang dilakukan masih dengan cara manual.

Alasan pemilik Peggy Salon melakukan pencatatan keuangan semata untuk menentukan besarnya bonus yang akan diberikan kepada karyawannya. Bonus yang diberikan kepada karyawan sebesar 10%-15% dari *treatment* yang diberikan kepada pelanggan. Semakin tinggi tingkat kesulitan saat melakukan *treatment* kepada pelanggan maka bonus yang didapat pun akan semakin besar.

Berdasarkan atas hasil pengamatan dan wawancara nampak bahwa pengalaman Ibu Made Akhir selama 15 tahun sebagai pengusaha telah membuat informan mengerti akan pentingnya melakukan pencatatan atas setiap transaksi usahanya. Keinginan atau niat yang dimiliki informan untuk mengembangkan usaha, untuk mempermudah dalam penggajian telah memotivasi informan untuk selalu melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan dengan alasan untuk mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan jasa yang terjadi pada usahanya serta untuk mengetahui bonus yang diberikan kepada karyawannya.

Hal ini sejalan dengan teori perilaku beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980 (Jogiyanto, 2007). Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam pencatatan akuntansi pada Peggy Salon, bentuk pencatatan yang kini diterapkan di Peggy Salon karena dipengaruhi oleh niat dari pemilik usaha. Niat atau keinginan pemilik usaha untuk

mengembangkan usahanya telah membuat pengusaha tersebut termotivasi untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksinya dengan rapi. Meskipun format yang digunakan berbeda dan tidak melakukan penjurnalan seperti pencatatan transaksi pada akuntansi, karena pengusaha ini membuat catatan menurut pemahamannya pribadi dan pengalaman yang dimiliki tanpa mempelajari pencatatan transaksi pada akuntansi.

Pencatatan akuntansi yang diterapkan pada Peggy Salon masih jauh dari SAK ETAP sehingga informasi yang diperoleh dari catatan yang dibuat belum dapat sepenuhnya mendukung atau bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh dari kegiatan operasional perusahaan. Manfaat dan keputusan usaha yang dapat dijalankan berdasarkan akuntansi dan laporan akuntansi berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Ediraras (2010) antara lain:

1. Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk yang akan datang.
2. Berguna sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi.
3. Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang/jasa, dan lain-lain.
4. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
5. Untuk pengembangan usaha, keputusan untuk membuka atau menutup cabang.
6. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.
7. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
8. Penambahan asset usaha.
9. Promosi usaha.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediraras, pada usaha kecil, seperti yang dikemukakan oleh Golrida (2008) dalam Musmini (2012) memang

sangat memerlukan informasi tentang kinerja usaha dan informasi tentang posisi keuangannya.

Penyajian laporan keuangan yang kontinyu pada usaha kecil harus memperhatikan prinsip konsistensi sehingga laporan dari periode sebelumnya dapat dibandingkan (komparabilitas) dengan periode berikutnya. Prinsip daya banding (komparabilitas) dapat memberikan informasi perkembangan usaha yang dilakukan selama ini. Apakah usaha tersebut menguntungkan ataukah hanya asal berjalan saja, tanpa memperoleh keuntungan, atau bahkan merugi.

Lebih lanjut Musmini (20120) mengemukakan bahwa prinsip lain yang harus dipegang dengan baik, tanpa toleransi adalah prinsip kesatuan usaha. Jadi kepentingan pemilik usaha dan usahanya harus dipisahkan, seperti dalam hal keuangannya, keuangan perusahaan terpisah dengan keuangan pemiliknya. Prinsip kesatuan usaha sangat sulit dijalankan, karena cakupan yang kecil dengan nilai uang yang relatif sedikit. Selain beberapa hal diatas yang relatif tidak ditemukan pada usaha kecil, teknis mengerjakan akuntansi juga dianggap sulit diterapkan karena rumit bagi pemilik ataupun manajer perusahaan, tidak sebanding dengan modal yang berputar pada usaha kecil tersebut yang relatif sedikit.

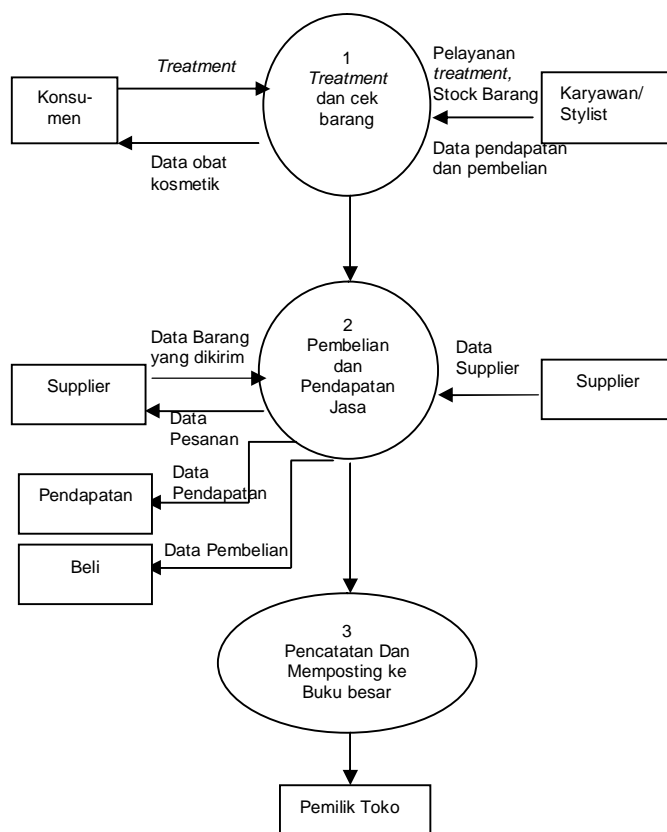
Pada usaha kecantikan Peggy Salon kegiatan yang dilakukan selama peneliti melakukan penelitian antara lain:

- membeli dan memesan Barang ke *supplier*,
- memberikan *treatment* kepada konsumen,
- mencatat barang masuk (pembelian) dan barang keluar (penjualan),
- pembayaran hutang kepada *supplier* serta
- pembayaran gaji karyawan

Prosedur pencatatan transaksi pendapatan Peggy Salon diawali dari setelah pemberian *treatment* kepada pelanggan, maka *stylist*/ karyawan yang menangani pelanggan tersebut akan

membuatkan nota rangkap dua, yang nantinya satu lembar nota akan diberikan kepada pelanggan dan satu lembarnya lagi akan digunakan sebagai arsip. Pada nota tersebut terdapat informasi mengenai identitas perusahaan, nomor urut nota, tanggal, nama *stylist*, jenis *treatment* yang dilakukan, jumlah satuan, harga satuan, jumlah dan total tagihan, serta bonus. Setiap akhir hari, nota-nota yang ditumpuk selama satu hari, kemudian dipindahkan ke buku besar.

Alur pencatatan transaksi yang ada pada Peggy Salon tergambar pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Diagram Zero Pencatatan Kegiatan di Peggy Salon (Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2013)

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Pencatatan Keuangan berbasis SAK ETAP

Implementasi pencatatan akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP memberi manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan

keuangan, manfaat tersebut antara lain (Anna, 2011) : (1) Bagi kreditor (pemberi pinjaman) dengan implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP UMKM dapat menyajikan laporan keuangannya sendiri, hal tersebut untuk memenuhi persyaratan utama untuk mengajukan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan atau perbankan, para kreditor nantinya dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (2) Pemilik UMKM dapat mengetahui laba, posisi keuangan, perubahan ekuitas pemilik dan arus kas perusahaan lebih sederhana (3) UMKM dapat menghitung besaran pajak secara akurat sesuai informasi akuntansi, (4) UMKM dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Walaupun telah dilakukan pelatihan dan seminar terkait penyusunan pencatatan akuntansi untuk usaha namun selama ini UMKM masih gagal dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP dan tidak jarang ada UMKM yang sama sekali tidak melakukan pencatatan keuangan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP antara lain dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal Penyebab Gagalnya Penerapan SAK ETAP

Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang mempengaruhi implementasi dari pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP, faktor internal yang menyebabkan gagalnya penerapan SAK ETAP ini yakni, *pertama*, kurangnya pengetahuan pemilik Peggy Salon mengenai standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selama ini pemahaman bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pemilik Peggy Salon. Jadi, latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bentuk penyusunan pencatatan keuangan yang diterapkan oleh Peggy Salon. *Kedua*, pemilik Peggy Salon merasa belum profesional untuk membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Pemilik kurang disiplin

dan rajin dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi usahanya ini dikarenakan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan, sehingga sulit sekali menyisihkan waktu untuk menyusun sistem pembukuan akuntansi. *Ketiga*, pandangan dari pemilik usaha bahwa kegiatan pencatatan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perhitungan dan transparansi dalam menentukan besarnya bonus kepada pegawai, ini sesuai dengan teori perilaku beralasan (*theory of reasoned action*) yang Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau individu akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem informasi tersebut akan memberi manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Melihat dari kenyataan di lapangan terkait dengan penerapan SAK ETAP jadi dapat dikatakan bahwa Pelaku UMKM akan memanfaatkan atau mengimplementasikan pencatatan keuangan berdasarkan SAK ETAP apabila pencatatan tersebut akan memberi manfaat atau kegunaan bagi dirinya.

b) Faktor Eksternal Penyebab Gagalnya Penerapan SAK ETAP

Salah satu penyebab dari Peggy Salon tidak melakukan pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP disebabkan pula karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM terutama dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator. Padahal kepedulian terhadap pengembangan UMKM sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Sejalan dengan hal tersebut, Raharjo (1993) dalam Auliyah (2012) menyatakan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM mengakibatkan rendahnya penyusunan laporan keuangan. Jadi perhatian dari pihak regulator terkait dengan peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sangat diperlukan.

Pihak perbankan merupakan salah satu pihak ketiga yang berhubungan terkait dengan permodalan UMKM adalah

pihak perbankan. Dalam memberikan pinjaman kepada UMKM pihak perbankan selalu memperhatikan aspek kelayakan suatu kegiatan usaha, aspek legalitas, serta *repayment capacity* dan adanya jaminan baik fisik maupun non fisik sebagai faktor pengaman. Untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur, maka pihak perbankan memerlukan laporan keuangan. Selain untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan utamanya yang mencakup kondisi likuiditas, kecukupan modal, porsi hutang, profitabilitas. Pihak perbankan memerlukan adanya laporan keuangan untuk memperkirakan volume usaha calon debitur yang ditunjukkan dengan besarnya aset dan penjualan. Serta dengan adanya laporan keuangan pihak perbankan dapat mengestimasi jumlah beban pinjaman yang dapat ditanggung oleh calon debitur.

Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur UMKM, yakni tidak tersedianya laporan keuangan usaha yang memadai untuk dianalisa oleh pihak perbankan, meskipun usaha UMKM tersebut *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan kredit bank. Usaha yang tidak *bankable* dipandang mengandung risiko kredit macet oleh bank. Untuk membantu pelaku UMKM dalam memenuhi syarat kelayakan usaha dengan membuatkan proforma laporan keuangan.

Jadi proforma laporan keuangan merupakan langkah proaktif yang dilakukan pihak perbankan dalam membantu calon debitur dan mempermudah dalam melakukan analisis kredit, langkah ini merupakan wujud kepedulian pihak perbankan terhadap UMKM. Akan tetapi, jika diinterpretasikan lebih jauh tidak hanya semata-mata sebagai wujud kepedulian pihak perbankan terhadap UMKM. Pembuatan proforma laporan keuangan ini juga sebagai bagian dari strategi bisnis perbankan dalam memasarkan kreditnya kepada masyarakat. Persaingan perbankan dalam menyalur kredinya ke UMKM sangatlah ketat, ini dapat dilihat

dari begitu variatifnya program-program kredit yang digulirkan untuk para pelaku UMKM maupun para calon wirausaha muda. Antara Bank satu dengan yang lainnya terjadi persaingan atau kompetisi dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, strategi dalam menghadapi persaingan inipun beragam yakni dengan membuka cabang khusus pelayanan kredit usaha, serta mengeluarkan program yang bunganya bersaing dengan program kredit dari bank lain, seperti yang tampak kutipan wawancara dengan Bapak Aditya selaku karyawan bagian kredit di Bank Mandiri berikut.

“.....kita programnya *nggak* tentu, tergantung waktu dan target yang dicapai, seperti kemarin akhir tahun kita ada program kreditnya itu dipinjam di kita kemudian pelunasannya bisa melalui bank lain, itu bunganya mencapai 0,09. *Macem-macem* programnya tergantung waktunya. *Kayak* kemarin akhir tahun karena target juga, jadi dari kantor pusat memberikan program seperti itu....., ya karena kita semua itu kompetisi, jadi semua mengeluarkan program-programnya, kita juga mau buka cabang baru khusus pelayanan kredit usaha di penarukan”

Mekanisme pembuatan proforma laporan keuangan ini merupakan salah satu strategi perbankan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit, hal ini dapat membahayakan karena bisa mendorong pihak perbankan untuk menyalurkan kredit kepada pihak yang tidak tepat. Selain itu hal ini dapat menyebabkan UMKM menjadi malas dalam memenuhi ketentuan SAK ETAP, karena selama ini mereka telah ‘dimanjakan’ dengan adanya pembuatan proforma laporan keuangan oleh pihak perbankan.

Selain berhubungan dengan pihak perbankan, pelaku UMKM juga berhubungan dengan pihak fiskus dalam hal perhitungan serta pembayaran pajak. Pemasukan tambahan dari pajak UMKM

merupakan kontribusi yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah serta untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar negeri (Riyanto, 2011). Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak maka UMKM harus menyusun Laporan keuangan. Namun prakteknya, kesesuaian pembuatan laporan keuangan UMKM dengan SAK ETAP masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Maksud pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan pajak demi mempermudah perhitungan pajak merupakan suatu hal yang positif, namun dibalik itu implementasi SAK ETAP pada UMKM akan terasa semakin berat, karena untuk bisa membayar pajak kini para pelaku UMKM tidak dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar, selain itu kurangnya pengawasan pula dari pihak fiskus terkait dari apa yang dihitung oleh UMKM terkait dengan pajak yang akan dibayarkannya. Selama ini pihak fiskus percaya dengan pajak yang telah dihitung dan dibayarkan oleh pengusaha UMKM, tanpa melakukan *crosscheck* langsung dengan data omset yang sebenarnya, jika nanti ditemukan adanya masalah atau data yang berbeda disaat itulah baru akan dilakukan sinkronisasi oleh pihak fiskus terhadap data yang ditemukan tersebut, seperti yang terungkap dari kutipan wawancara dengan salah satu bagian penyuluhan pajak di KPP Singaraja.

“pajak ini *kan self assessment system* jadi wajib pajak yang menghitung sendiri membayar sendiri. Ya awalnya kita percaya-

percaya saja, berapapun yang dia bayar berapa pun yang dia hitung, kemudian kita menemukan data, kita sinkronkan, ‘kok nggak pas ini’, bayarnya 10.000 ternyata omsetnya jauh lebih dari itu jadi kita minta agar disesuaikan”.

Jadi, apabila UMKM telah menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan SAK ETAP pastinya akan mempermudah dalam proses pengajuan pinjaman ke pihak perbankan dan dalam ketepatan perhitungan pajak penghasilan. Untuk terciptanya sektor UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, *professional* dan berdaya saing, maka diperlukan unsur “keharusan” dalam implementasi pencatatan dan pelaporan. Unsur “keharusan” ini diantaranya dapat dilaksanakan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu entitas UMKM guna memperoleh pembiayaan, maupun perijinan-perijinan tertentu. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Pelaku entitas UMKM perlu diberikan dorongan dan pemahaman terkait manfaat dari pencatatan akuntansi, misalnya manfaat pencatatan transaksi, baik bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga, misalnya institusi perijinan dan lembaga pembiayaan. Jadi, tahapan pertama yang dilakukan yakni memunculkan kesadaran/pemahaman pelaku UMKM akan manfaat dan pentingnya pencatatan transaksi, selanjutnya perlu diadakan Pelatihan teknis pencatatan transaksi dan penyusunan laporan. Namun percuma saja pelatihan diadakan jika tanpa adanya tindak lanjut terkait dengan implementasi pencatatan akuntansi pada UMKM. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian *stakeholder* sebagai wujud pengendalian sosial dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM. Pendampingan ini ditunjukkan untuk memastikan bahwa hasil

pelatihan dan standar keuangan yang ada telah diterapkan dengan baik dalam kegiatan sehari-hari.

Dukungan yang bersifat kelembagaan, baik dalam bentuk adanya suatu institusi yang menangani peningkatan kapasitas dan kompetensi entitas UMKM, berbagai kegiatan institusi pemerintah, BUMN maupun BUMS, serta aspek peraturan dan perundangan yang berfungsi sebagai alas hukum kegiatan pengembangan kompetensi UMKM sangat diperlukan dalam upaya implementasi penyusunan laporan keuangan dan rencana usaha berbasis SAK ETAP pada UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keinginan atau niat yang dimiliki informan untuk mengembangkan usaha, untuk mempermudah dalam penggajian telah memotivasi informan untuk selalu melakukan bentuk pencatatan keuangan seperti yang kini dilakukan oleh Peggy Salon, namun pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan dilakukan dengan cara manual. Tidak terlaksanannya pencatatan akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam UMKM tersebut, sedangkan faktor eksternal yakni tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM (*stakeholder*) yakni dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator. Selama ini pihak perbankan selaku *stakeholder* telah ikut serta membantu UMKM agar lebih mudah dalam hal pengajuan pinjaman dengan membantu pembuatan proforma laporan keuangan, kemudian pemerintah telah mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Kemudahan yang diberikan para *stakeholder* kepada UMKM ini menyebabkan implementasi SAK ETAP

berjalan lambat. Jadi, untuk terciptanya sektor UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, *professional* dan berdaya saing, maka diperlukan unsur "keharusan" dalam implementasi pencatatan dan pelaporan selain itu diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM dalam hal ini tentunya pengawasan dari *stakeholder*.

Saran

Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, kepada para pelaku UMKM yang belum menerapkan akuntansi agar mulai menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bagi *stakeholder* untuk ikut serta dalam mendukung dan mengawasi implementasi SAK ETAP. Dukungan dan pengawasan ini tentunya akan membantu mendisiplinkan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan serta membantu pihak perbankan dalam menganalisis kelayakan usaha dan pihak fiskus dalam memenuhi administrasi perpajakan. Selain itu perlu adanya suatu badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari SAK ETAP. Sehingga dengan adanya badan pengawas ini ke depannya seluruh UMKM yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, Yane Devi. 2011. *Analisis Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah- Sentra Industri Kaos di Jawa Barat*. Seminar Nasional "Perkuatan UMKM sebagai *Leading Sector* Perekonomian Indonesia". Institut Manajemen Telkom (IMT). Bandung.
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP

- pada ukm kampung batik di sidoarjo. Artikel ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Bank Indonesia. 2010. *Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM- Persiapan Bank Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ediraras, Dharma T. Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ek onomi Bisnis No. 2, Volume 15, Agustus 2010. Universitas Gunadarma.
- Herawati, Trisna, dkk. 2010. *Pelatihan Penyusunan Laporan Laba Rugi (Income Statement) pada Perusahaan Jasa Salon dan Spa di Kota Singaraja*. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Diunduh pada <http://www.iaiglobal.or.id/> tanggal 3 Desember 2013.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Musmini, Lucy Sri. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja)*. VOKASI Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No.1, April 2013, ISSN 2337 – 537X. Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha.
- Neuman, W. L. (2000). *Sosial research methods: qualitative and quantitative approaches*. Allyn and Bacon. Boston.
- Pinasti, M. 2007. *Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Suatu Riset Eksperiman*.
- Riyanto, Rum. 2011. Keberadaan Pajak UMKM bagi Pembangunan Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).